

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara korban pelecehan seksual merupakan kewajiban pemerintah yang seharusnya memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap ASN diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 92 Ayat 1, dan diatur dalam pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur secara jelas hal – hal yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Tujuan penulisan ini adalah untuk meninjau perlindungan hukum terhadap ASN yang menjadi korban pelecehan seksual berdasarkan hukum kepegawaian. Metode penulisan ini menggunakan metode normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Pembahasan menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum bagi ASN belum ada petunjuk yang jelas. Memberikan hukuman mutasi dan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang dan memberikan pendampingan terhadap korban pelecehan seksual sangat diperlukan dan Fiqh *jinayah* mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan memberikan sanksi berdasarkan tingkat kejahatannya.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Aparatur Sipil Negara, Korban Pelecehan Seksual.*

ABSTRACT

*Legal protection for State Civil Apparatus victims of sexual harassment is the government's obligation which should provide security and comfort to its citizens. Legal protection for ASN is regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) Article 92 Paragraph 1, and regulated in article 308 of Government Regulation Number 17 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants , but the Government Regulation does not clearly regulate what is meant by legal protection. The purpose of this paper is to review the legal protection of ASN who are victims of sexual harassment based on employment law. This writing method uses the normative method. The author uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion explain that the regulation regarding legal protection in the form of legal aid for ASN has no clear instructions. Providing transfer penalties and legal sanctions as regulated in the Act and providing assistance to victims of sexual harassment is very necessary and Fiqh of *jinayah* regulates prevention by humans and provides sanctions based on the level of crime.*

Keywords: *Legal Protection, State Civil Apparatus, Victims of Sexual Harassment.*